

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga Tahun 2000 – 2004 , visi pendidikan nasional adalah :

*Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.*

Sejalan dengan visi tersebut maka kebijakan dan program pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan baik di pusat maupun di daerah sehingga secara efektif dapat memacu peningkatan mutu dan relevansi pendidikan , pemerataan kesempatan belajar secara berkelanjutan serta pengelolaan secara otonom.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 ( dua ) jalur , yaitu *jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Sedangkan pendidikan dasar merupakan pendidikan yang diselenggarakan selama 6 ( enam ) tahun di Sekolah Dasar ( SD ) dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) atau satuan pendidikan yang sederajat.*

Pembangunan nasional menuju Indonesia baru yang dicita-citakan menuntut agar pendidikan mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Menurut Nanang Fattah ( 2000 : 13 ) yang dimaksud dengan sumber daya manusia yang mengambil dari Setthy dan Vernon B. Butcher ( 1985 ) terkandung aspek *kompetensi* , *keterampilan / skill* , *kemampuan* , *sikap* , *perilaku* , *motivasi dan komitmen*. Oleh karena itu Pemerintah melalui berbagai upaya selalu memberikan perhatian terhadap pendidikan dasar , yang dilaksanakan secara berkesinambungan

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otonom. Produk hukum tersebut mengisyaratkan terjadinya pergeseran kewenangan dalam pengelolaan pendidikan.

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai realisasi pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan tidak terpusat , secara utuh dan terpadu mulai dari tingkat kebijakan , manajemen , dan operasional dalam berbagai aspek dan dimensi pendidikan.

Desentralisasi pendidikan mempunyai makna pemberian kewenangan penyelenggaraan pendidikan kepada tingkat yang lebih rendah baik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maupun pendidikan. Dalam kaitan ini desentralisasi pendidikan memberikan

kewenangan pelaksanaan fungsi – fungsi manajemen pendidikan pada daerah hingga tingkat institusional dan instruksional.

Operasional pendidikan pada tingkatan mikro / lapis dasar (*grass root*) adalah di tingkat institusional dan instruksional, yaitu di tingkat satuan pendidikan atau lembaga dan proses belajar mengajar. Pada tingkat ini pendidikan berlangsung di front yang paling depan, tempat dan saat terjadinya interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik dalam situasi pendidikan, serta pada posisi lain paling dekat dengan pengguna jasa, yaitu orang tua dan masyarakat.

Pada hakekatnya desentralisasi pendidikan diantaranya merupakan pelaksanaan pendidikan pada tingkat institusional, sehingga konsekuensinya sekolah harus memperoleh kewenangan yang penuh dalam melaksanakan manajemen pendidikan pada tingkat institusi.

Arah kebijakan pendidikan yang telah diamanatkan oleh GBHN 1999 –2004, diantaranya adalah :

1. *Membudayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai*
2. *Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen*
3. *Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.*

Dari arah kebijakan pembangunan pendidikan tersebut di atas

indikator kinerjanya adalah : (1) Tersusunnya konsep pendidikan nasional, termasuk konsep *pembentukan Dewan Pendidikan* di tingkat Kabupaten / Kota ; (2) *Terlaksananya perintisan konsep Dewan Pendidikan* di tingkat Kabupaten / Kota (3) *Meningkatnya peran dan fungsi Komite/Dewan Sekolah* di seluruh SD dan MI serta SLTPdan MTs. ( GBHN 1999 -2002 : 246 )

Menyimak amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 bahwa peningkatan peranserta masyarakat harus diupayakan semaksimal mungkin mengingat keberhasilan pendidikan yang berkualitas pada jenjang pendidikan dasar akan dicapai salah satunya apabila masyarakat melalui Dewan Sekolah peran dan fungsinya ditingkatkan. Djaman Satori , mengemukakan bahwa : *desentralisasi pengelolaan pendidikan di sekolah , berarti adanya pelimpahan wewenang kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan untuk ikut serta bertanggungjawab dalam memajukan sekolah.*

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 , tanggal 2 April 2002 , Lampiran II Acuan Pembentukan Komite/Dewan Sekolah atau nama lain disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan yang disepakati , bertujuan untuk :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan

pendidikan ;

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan , akuntabel , dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan .

Adapun peran dewan sekolah adalah sebagai berikut :

1. Pemberi pertimbangan ( *advisory agency* ) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan ;
2. Pendukung ( *supporting agency* ) , baik yang berwujud finansial , pemikiran , maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;
3. Pengontrol ( *controlling agency* ) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan ;
4. Mediator antara pemerintah ( *eksekutif* ) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Menghadapi perubahan penyelenggaraan pendidikan seperti yang digambarkan di atas, maka pendidikan mempunyai peran yang sangat penting, menurut Soebagio Atmodiwirio ( 2000 : 31 ) sekurang-kurangnya memiliki empat fungsi, yaitu :

*(1) fungsi sosial, memerangi segala keterbelakangan dan kebodohan ; (2) fungsi pembaharuan dan inovasi, meningkatkan kehidupan dan martabat manusia ; (3) fungsi pengembangan sosial dan pribadi , meningkatkan ketahanan nasional dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan*

*berdasarkan kebudayaan bangsa ; (4) fungsi seleksi mengembangkan kemampuan manusia Indonesia.*

Disisi lain, Suwarma Al Muchtar ( 2001 : 2-4 ) berpendapat bahwa *pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembentukan masyarakat terdidik mampu mengembangkan potensinya dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan mampu menciptakan budaya belajar berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan.*

Sedangkan menurut Wardiman Djojonegoro ( 1996 ) , pendidikan paling kurang memiliki tiga fungsi , yaitu :

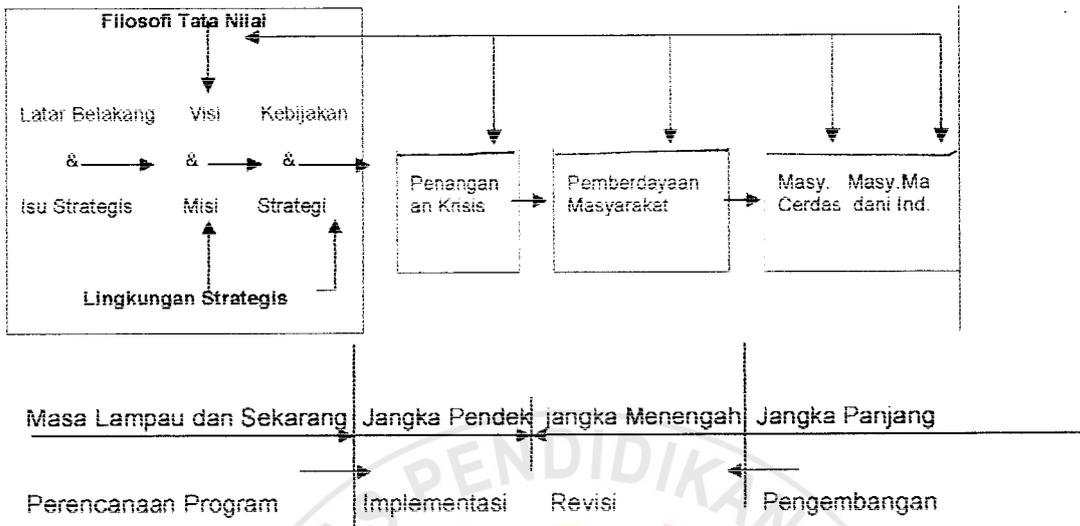
- (1) mencerdaskan seluruh rakyat ,*
- (2) menyiapkan tenaga kerja ,*
- (3) membina dan mengembangkan IPTEK dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.*

Dari pengertian di atas , menjelaskan bahwa pendidikan bagi suatu bangsa pada situasi apapun sangatlah penting, terlebih lagi pada saat terjadinya perubahan yang mendasar dan cepat , sebagai konsekuensi logis dari reformasi dan otonomi daerah yang berlaku mulai Januari 2001. Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan harus tetap eksis dan tampil seirama dengan nuansa kehidupan masyarakat yang sedang menata melalui reformasi untuk menuju kehidupan yang lebih meningkat akses masyarakat dalam berperanserta diberbagai aspek kehidupan.

Fasli Jalal dan Dedi Supriadi ( 2001 : 19 ) menggambarkan

Paradigma Pengembangan Pendidikan Nasional , sebagai berikut :

Gambar 1



Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ( UU No.2 Th.1989 ) merupakan suatu sistem yaitu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional , selanjutnya PP Ri No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar pasal 27 menyebutkan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan masyarakat terutama dunia usaha dan para dermawan , untuk memperoleh dana dalam rangka perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan.

Kaitannya dengan hal tersebut maka Kepala Sekolah sebagai orang yang menduduki posisi jabatan penting dan tertinggi di sekolah mempunyai tugas sebagai pemimpin.



Oleh karena itu Kepala Sekolah harus mampu memperan  
kepemimpinannya di sekolah dalam rangka mencapai tujuan, ya  
diharapkan, Hadari Nawawi ( 1987 : 81 ) mengemukakan bahwa :

*Kepemimpinan pada dasarnya berarti kemampuan menggerakkan, memberikan motivasi dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan mengambil keputusan itu mengandung arti mampu menetapkan :*

- a. Apa ( What ) yang harus dilakukan*
- b. Bagaimana ( How ) melakukannya*

dengan demikian kepala sekolah harus mampu dan berani mengambil keputusan dalam rangka memajukan sekolahnya. Dalam hal untuk memajukan sekolah dan menanggulangi kesulitan-kesulitan yang dialami sekolah, kepala sekolah tidak hanya bekerjasama dengan guru-gurunya saja, melainkan harus melakukan hubungan kerja sama yang baik dan proaktif dengan masyarakat.

Sekolah merupakan bagian dari sistem masyarakat dan berada di bawah pengaruh masyarakat. Sekolah juga sebagai pranata sosial merupakan suatu sistem terbuka " *A school is an open system to degree that it interacts with its environment and the larger of wich it is part* " ( Tye and Novotnye, dalam Manap, 1999 : 24 ).

Selanjutnya Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, ( 2001 : 213 ) mengemukakan bahwa demikian pentingnya pendidikan bagi masyarakat, sehingga kemudian muncul institusi-institusi khusus yang dipersiapkan untuk menjadi tempat pendidikan sehingga proses pendidikan dapat

berlangsung dengan efektif. Dengan demikian sekolah sebagai bagian dari masyarakat mempunyai fungsi dan membantu memenuhi tuntutan . kebutuhan masyarakat seperti :

1. Fungsi ekonomis sekolah adalah memberikan bekal kepada siswa agar dapat hidup sejahtera ,
2. Fungsi sosial sekolah adalah , sebagai media bagi siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat ,
3. Fungsi politik sekolah adalah , sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara ,
4. Fungsi budaya adalah sebagai media untuk melakukan transmisi dan transformasi budaya , dan
5. Fungsi pendidikan , sekolah sebagai wahana proses pendewasaan dan pembentukan kepribadian siswa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional , pasal 2 menyebutkan bahwa *peranserta masyarakat berfungsi ikut memelihara , menumbuhkan , meningkatkan , dan mengembangkan pendidikan nasional .*

Beranjak dari hal di atas ternyata bentuk dan sifat peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah terbatas hanya memberikan bantuan. Hal ini makin rumit dan unik, terlebih lagi dihadapkan dengan terbatasnya berbagai sumber pendukung dari pemerintah yang amat diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan



yang memadai. Sesuai dengan tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga termasuk keluarga dan masyarakat, maka untuk dapat mewujudkan kondisi yang memadai E.Mulyana ( 2001 : 38 ) mengemukakan bahwa tanggung jawab masyarakat mengandung pengertian masyarakat harus :

- a. *membantu terlaksananya pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah;*
- b. *berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan ; dan*
- c. *menciptakan kondisi belajar untuk mewujudkan pendidikan seumur hidup*

Berkenaan dengan hal tersebut dan sejalan dengan bergulirnya desentralisasi pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah , maka kepala sekolah harus mampu meningkatkan peranserta masyarakat dan orang tua murid dalam rangka memajukan sekolahnya. Hal ini sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk menjadikan Jawa Barat sebagai “ Propinsi termaju dan mitra terdepan ibukota negara “ pada tahun 2010 , dengan salah satu kegiatan yang diyakini memiliki nilai tambah dalam mengakselerasi program pendidikan adalah melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dan Pembentukan Dewan Sekolah.

Sekolah Dasar ( SD ) merupakan satuan pendidikan dasar yang sangat strategis yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya

sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah ( pasal 3 PP No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar ), sedangkan Sekolah Dasar ( SD ) bertujuan memberikal bekal kemampuan dasar " Baca Tulis Hitung " , pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangan serta mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan di SLTP.

Keberhasilan proses pembelajaran pada tataran berikutnya akan sangat ditentukan oleh pengalaman pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat SD agar dapat mewujudkan keberhasilannya sesuai dengan harapan masyarakat, maka salah satunya diperlukan adanya pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui Dewan Sekolah. Hal ini perlu disadari dan dimaknai oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga keberadaan Dewan Sekolah dapat berperan dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Melihat kondisi yang demikian maka kepemimpinan kepala sekolah hendaknya dikembangkan sesuai dengan sistem pendidikan nasional dan arah kebijakan dalam GBHN 1999 – 2004 agar menciptakan situasi belajar yang kondusif bagi tercapainya hasil belajar yang optimal, sehingga akan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dadi Permadi( 1998 : 33 ) mengemukakan bahwa ketidakberhasilan seorang pemimpin sering disorot sebagai kegagalan dalam menata sumber daya yang tersedia

atau mungkin dapat disediakan di samping menonjolnya perilaku kepemimpinan tradisional yang kurang mengembangkan inisiatif dan kreatifitas. Dalam pandangan "*enterpreneurial administration*" kepala sekolah hendaknya lebih dari sekedar sebagai agen pembaharu. Menurut Rongers ( 1983 ), agen pembaharu adalah "*an individual who influences clients innovation decision in a direction deemed desirable by a change agency*"

Sebagai pembaharu kepala sekolah menempatkan dirinya mulai dari bagaimana inovasi itu sendiri diperoleh, dirancang, dan dilaksanakan, serta dievaluasi.

Ditinjau dari perspektif sejarah persekolahan pada tingkat SD,SLTP,SMU/SMK di Indonesia, khususnya orang tua siswa telah memerankan fungsinya dalam membantu penyelenggaraan pendidikan, perkembangannya sebagai berikut :

Tabel 1

### PERKEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

No	Tahun	Organisasi	Dasar Hukum
1	Sebelum Tahun 1974	POMG	
2	1974 – 2001	BP 3	a. SK Bersama Mendikbud dan Mendagri RI No.17/O.1974 dan No.29 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan b. Kep.Gubernur Kep.Daerah TK I Jabar, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan BP3 Sekolah Dasar Negeri dan Tata Cara Penerimaan Sumbangan dari Orang tua/Wali Murid dan Masyarakat

*dilanjutkan*

3	Tahun Pelajaran 2000 / 2001-sekarang	Dewan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 2 Tahun 1989</li> <li>b. GBHN 1999-2004</li> <li>c. UU No.22 Tahun 1999</li> <li>d. UU RI No.25 Tahun 2000</li> <li>e. SK.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang Penerapan MBS di Jawa Barat</li> <li>f. Keputusan Mendiknas RI No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Dewan Sekolah</li> </ul>
---	--------------------------------------	---------------	--

Selama ini organisasi POMG / BP3 dalam kegiatannya menghimpun partisipasi masyarakat ( orang tua murid ) terbatas pada bantuan dana dan fasilitas sekolah Selain dari pada itu , keterlibatannyapun baik orang tua murid dan pengurus BP3, terhadap kemajuan pendidikan di sekolah sangatlah terbatas. Ini perlu dikembangkan peran dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah Kondisi ini salah satu kekuatan yang dimiliki.

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah , dan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi ke arah desentralisasi , sehingga Kepala Dinas Propinsi Jawa Barat pada acara pembinaan personil Kepala Sekolah dari TK sampai SLTA di Kota Cirebon Kamis , 19 Juli 2001 menyampaikan himbauan agar paling lambat bulan Desember 2001 di setiap sekolah sudah terbentuk Dewan Sekolah , yang sebelumnya pada tahun pelajaran 1999 / 2000 di Kota Cirebon telah diuji cobakan kepada 3 (tiga) SD

Negeri untuk melaksanakan MBS

Betapa pentingnya peran kepala sekolah dan dewan sekolah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di jalur sekolah. Beranjak dari otonomi sekolah tersebut maka sekolah harus mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal bersama Dewan Sekolah.

Dewan Sekolah menurut Kep.Mendiknas No.044/U/2002 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) *Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;*
- 2) *Melakukan kerjasama dengan masyarakat ( perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri ) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;*
- 3) *Menampung dan menganalisis aspirasi , ide , tuntutan , dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;*
- 4) *Memberikan masukan , pertimbangan , dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :*
  - a. *kebijakan dan program pendidikan ;*
  - b. *Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah*
  - c. *Kriteria kinerja satuan pendidikan ;*
  - d. *Kriteria tenaga kependidikan ;*
  - e. *Kriteria fasilitas pendidikan dan ;*
  - f. *Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan*
- 5) *Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan ;*
- 6) *Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;*
- 7) *Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan , program , penyelenggaraan , dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.*

Pendidikan dasar pada tingkat sekolah dasar sebagai basis awal

pendidikan formal yang perlu mendapat sentuhan dan pengelolaan yang lebih baik , supaya anak didik dapat dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan , dan keterampilan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi serta memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai budi pekerti luhur.

Sehubungan dengan hal itu dewan sekolah diperlukan keberadaannya di setiap sekolah. Ungkapan tersebut memberikan makna bahwa proyeksi dewan sekolah untuk meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan kepada masyarakat , sehingga akan terjadi hubungan yang harmonis dan saling memerlukan antara Kepala Sekolah-Dewan Sekolah

Upaya peningkatan dan layanan pendidikan kepada masyarakat merupakan tugas yang sangat berat . Pemerintah telah berusaha melalui pembaharuan kurikulum dan metode mengajar , peningkatan sarana dan prasarana pendidikan , peningkatan pengadaan buku-buku pelajaran , penataran guru serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun indikator peningkatan mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata.

Ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata ( Umaedi : 2000 ) :

*Pertama* , kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru , pengadaan guru dan alat pelajaran , perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya dipenuhi maka mutu pendidikan

( output ) akan terjadi. Dalam kenyataan , mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi , karena selama ini dalam menerapkan pendekatan *education production function* terlalu memusatkan pada input kurang memperhatikan pada output pendidikan

*Kedua* , penyelenggaraan pendidikan nasional secara sentralistik , sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang cukup panjang . Bahkan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat , sehingga sekolah kehilangan kemandirian , motivasi , dan inisiatif untuk mengembangkan sekolah dan memajukan peningkatan mutu pendidikan.

*Ketiga* , peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini minim dan umumnya bersifat dukungan input ( dana ) , bukan pada proses pendidikan ( pengambilan keputusan , monitoring , evaluasi dan akuntabilitas ). Berkaitan dengan akuntabilitas sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pendidikan kepada masyarakat khususnya orang tua siswa , sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan ( *stakeholder* )

Senada dengan hal tersebut di atas maka upaya peningkatan mutu pendidikan harus melibatkan semua stakeholder pendidikan yang memiliki komitmen bersama terhadap mutu pendidikan. Oleh karena itu diperlukan penataan pendidikan yang lebih baik ( Engkoswara:1987:63 ) ,

sehingga sekolah dapat menunjukkan tingkat kinerjanya sesuai dengan indikator sebagai berikut : (1) *layanan belajar bagi siswa*; (2) *pengelolaan dan layanan siswa*; (3) *sarana dan prasarana sekolah* ; (4) *program dan pembiayaan* ; (5) *partisipasi masyarakat* ; dan (6) *budaya sekolah*.

Djaman Satori (1999 : 10-11 ) cara lain yang strategis untuk meningkatkan kualitas hasil dari suatu sistem antara lain melalui Manajemen Berbasis Sekolah.

Berdasarkan studi penjajagan diperoleh informasi bahwa Sekolah Dasar Negeri di Kota Cirebon seluruhnya telah mengimplementasikan konsep MBS , salah satu indikatornya adalah telah terbentuk Dewan Sekolah di setiap sekolah. Namun demikian Dewan Sekolah yang telah terbentuk belum memenuhi harapan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah . Hal ini disebabkan , diantaranya :

1. Proses pembentukan Dewan Sekolah hanya sekedar merubah nama dari BP3 menjadi Dewan Sekolah.
2. Kurangnya sosialisasi tentang peran dan fungsi Dewan Sekolah ( Kepmen Diknas RI Nomor 044/U/2002 ) kepada semua stakeholder pendidikan di tingkat sekolah.
3. Kurang mantapnya perencanaan dalam rangka implementasi MBS dan Dewan Sekolah.
4. Kurang dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Sehingga dalam kenyataan di lapangan terjadi kondisi yang tidak menguntungkan. , diantaranya: 1) belum berfungsi dan berperannya dewan sekolah ; 2) terjadi pemahaman yang berbeda ; 3) masih terjadi praktek-praktek seperti pada saat Bp3.

Sehubungan dengan hal tersebut , penulis memandang perlu untuk meneliti masalah yang berkenaan dengan : " **Menuju Pemberdayaan Dewan Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Manajemen Pendidikan di Sekolah** " dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif analitik . Penelitian ini memilih pada jenjang Sekolah Dasar Negeri di Kota Cirebon.

Tabel 2  
KEADAAN SEKOLAH DASAR / MI NEGERI/SWASTA  
DI KOTA CIREBON

NO	KECAMATAN	SD		MI		Jumlah
		N	S	N	S	
1	Kejaksan	29	4	-	-	33
2	Lemahwungkuk	21	5	1	-	27
3	Harjamukti	39	-	-	5	44
4	Kesambi	37	6		9	52
5	Pekalipan	12	3		3	18
	Jumlah	138	18	1	17	174

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon

Adapun Kondisi objektif pendidikan di Kota Cirebon tahun 2002 adalah sebagai berikut ni .

1: Keadaan Penduduk Kota Cirebon

Letak geografis Kota Cirebon merupakan daerah pelintasan jalur

ekonomi dan perdagangan yang sangat berpengaruh khususnya terhadap mobilisasi penduduk. Setiap harinya hampir ratusan ribu pada pagi dan siang hari disinggahi oleh penduduk luar Kota Cirebon. Jumlah penduduk kota Cirebon kurang lebih sebanyak 245.000 orang yang tersebar di lima kecamatan dengan berbagai karakteristik , baik ditinjau dari tingkat sosial , ekonomi , pendidikan , mata pencaharian dan budaya. Hal ini mewarnai kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ( hasil Sensus Pendidikan tahun 2002 oleh Dewan Pendidikan ) , seperti pada halaman table di bawah ini.

**Tabel 3**  
**PENDUDUK KOTA CIREBON BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	USIA /PENDIDIKAN	SEKOLAH	DO	TDK.SEK
1	0-6 TAHUN	-	-	26.732
2	7-12 TAHUN	28.231	1.117	1.480
3	13-15 TAHUN	11.951	571	605
4	16-18 TAHUN	10.587	645	746
5	19 TAHUN KE ATAS :			
	SD	45.416		
	SLTP	23.416		
	SLTA	54.983		
	D 1	2.557		
	D 2	1.340		
	D 3	5.684		
	S 1	10.964		
	S 2	555		
	S 3	115		
	TIDAK SEKOLAH			17.514
	<b>Jumlah : 244.643</b>	<b>195.233</b>	<b>2.333</b>	<b>47.077</b>

### 3. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Keadaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah dasar di Kota Cirebon yang jumlahnya 138 SD Negeri dan 18 SD Swasta kondisinya harus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

### 4. Keadaan Guru dan Siswa SD / MI

**Tabel 4**  
**JUMLAH GURU DAN MURID SD / MI**  
**KOTA CIREBON**

No	Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Ket.
1	SD Negeri	30.672	1.177	
	SD Swasta	4.778	216	
2	MI Negeri	159	11	
	MI Swasta	2.583	143	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon

Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar yang efektif dan mandiri ditentukan oleh kelengkapan sumber daya pendidikan. Salah satu faktor penentunya adalah terpenuhinya guru, baik kuantitas maupun kualitasnya di setiap sekolah. Oleh karena itu peningkatan partisipasi masyarakat melalui Dewan Sekolah sangat diperlukan.

Partisipasi masyarakat dalam konteks MBS adalah kesadaran dan kepedulian masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas untuk turut serta mengambil keputusan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan



suatu program pendidikan di sekolah secara proposional yang dilandasi kesepakatan ( Tim Pokja SBM Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat )

Pendekatan manajemen partisipatif dalam kepemimpinan kepala sekolah seperti yang dikemukakan oleh Keith dan Girling ( 1991 ) menyatakan bahwa " Karakteristik dari manajemen partisipatif adalah perencanaan yang dibuat di sekolah ( school based planning ).

Selanjutnya dinyatakan bahwa kepala sekolah di samping berperan sebagai manajer juga berperan sebagai pendidik , fasilitator , komunikator , pejabat formal , nara sumber di lingkungan sekolahnya dan sebagai staf. Oleh karena itu mewujudkan hasil pendidikan yang bermutu maka diperlukan komitmen dari semua elemen dan stokeholder pendidikan.

## **B. Masalah Penelitian**

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah dasar sangat ditentukan oleh berbagai faktor , diantaranya adalah kurikulum , guru , alat peraga/media pendidikan , kepala sekolah , manajemen sekolah , sarana prasarana dan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat ini didasarkan kemitra sejajaran atas kepentingan bersama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, sehingga hubungan ini terwujud menjadi hubungan kerjasama. Agar hubungan kerjasama lebih sinergi maka dibentuklah wadah yang disebut Dewan Sekolah.

Ukuran keberhasilan kerjasama antara sekolah dan Dewan Sekolah manakala dapat mewujudkan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang pada gilirannya akan berdampak terhadap kemandirian dan peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan mengacu pada standar pelayanan minimal di sekolah.

Kehadiran Dewan Sekolah merupakan hal baru yang pembentukannya didasarkan atas SK. Mendiknas No.044/U/2002 TANGGAL 2 April 2002 , oleh karena itu agar dewan sekolah dapat berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya maka perlu ada upaya menuju pemberdayaan dewan sekolah. Kaitannya dengan penelitian ini difokuskan pada upaya pemberdayaan dewan sekolah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan

Beritik tolak dari permasalahan di atas yang menyangkut tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar negeri Kota Cirebon , maka sebagai kendali penelitian supaya terfokus pada pokok persoalan , di bawah ini dikemukakan pertanyaan-pertanyaan penelitian , sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menuju pemberdayaan Dewan Sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan.?
2. Bagaimana tingkat keterlibatan Dewan Sekolah dalam meningkatkan

kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah ?

3. Mengetahui persepsi peran , fungsi dan pendekatan secara menyeluruh yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mewujudkan pendidikan yang berkualitas ?
4. Mengetahui hasil yang diharapkan atas upaya pemberdayaan Dewan Sekolah dalam peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya menuju pemberdayaan Dewan Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri Kota Cirebon terhadap fenomena permasalahan yang difokuskan. Penulis berusaha memahami , menghayati makna apa yang ada dibalik realitas empiris dari interaksi sekolah dan masyarakat , dilihat dalam konteks pemberdayaan dewan sekolah.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang :

1. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menuju pemberdayaan Dewan Sekolah guna meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
2. Identifikasi tingkat partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah untuk mewujudkan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di

sekolah.

3. Persepsi peran , fungsi dan pendekatan secara menyeluruh yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di sekolah.
4. Hasil yang diharapkan atas upaya menuju pemberdayaan Dewan Sekolah dalam peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena mengandung unsur manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pendidikan pada umumnya serta dalam spesialisasi administrasi pendidikan pada khususnya.

Pemberdayaan Dewan Sekolah merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan , sehingga kualitas dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat akan meningkat . Partisipasi masyarakat terhadap sekolah sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat sangat diperlukan kehadirannya di sekolah.

Makin tinggi perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah maka akan makin tinggi pula layanan dan kualitas pendidikan yang akan dihasilkan. Hal ini dapat terwujud salah satunya

adalah apabila sekolah dan dewan sekolah melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif.

Pemberdayaan dewan sekolah perlu diupayakan oleh berbagai pihak ( stakeholder ) pendidikan. Dewan Sekolah merupakan masalah yang aktual dan sangat penting pada masa perubahan paradigma pendidikan saat sekarang, karena mengandung implikasi yang luas terhadap masalah-masalah praktis dalam bidang pendidikan . Mengatasi masalah merosotnya mutu pendidikan dan tuntutan masyarakat dewasa ini salah satunya ditentukan oleh peranserta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan baik di sekolah , masyarakat maupun di rumah.

Peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh peran kepala sekolahnya , sehingga kepala sekolah mampu untuk menggali sumber daya yang tersedia secara optimal.

Administrator pendidikan yang merupakan peranan kepala sekolah pada tingkat mikro , meso , serta makro mempunyai manfaat yang penting dalam merumuskan serta menentukan kebijakan sistem pendidikan. Dengan demikian hasil penelitian ini dalam bidang administrasi pendidikan merupakan sumbangan yang bermanfaat bagi para kepala sekolah.

#### **E. Asumsi Penelitian**

Asumsi dalam penelitian ini merupakan pegangan dan titik tolak pemikiran untuk memprediksi dan memaparkan , sebagai berikut :

1. Upaya menuju pemberdayaan Dewan Sekolah dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif.
2. Partisipasi masyarakat melalui keterlibatan Dewan Sekolah dapat mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah
3. Makin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan maka akan makin cepat terwujudnya kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
4. Pemberdayaan Dewan Sekolah dapat mewujudkan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah .

#### **F. Kerangka Penelitian**

Kerangka penelitian ( paradigma penelitian ) diartikan sebagai suatu kesatuan persepsi, gagasan konsep dan nilai-nilai yang menentukan pola berfikir dan berperilaku manusia dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Dengan pengertian ini maka pendidikan di masa depan harus melakukan adaptasi pola berfikir dan bertindak dengan menggunakan paradigma yang dipandang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat global. Kerangka berfikir tentang implementasi administrasi pendidikan dan hubungannya dengan

pemberdayaan dewan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Di bawah ini penulis gambarkan tentang kerangka penelitian ini, sebagaimana tertera pada halaman 28.

Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan di sekolah akan sangat berpengaruh terhadap hasil pendidikan, oleh karena itu semua pihak yang berkepentingan (*para stakeholder*) pendidikan harus mampu mengupayakan pemberdayaan dewan sekolah secara efektif dan mandiri. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap perhatian masyarakat, adapun proses strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Dewan Sekolah adalah sebagai berikut:

a. Input terdiri dari :

1. Masyarakat / orang tua siswa
2. Pemerintah
3. Dunia Usaha
4. Kepala Sekolah
5. Guru

b. Proses berisi tentang ,

1. Motivasi untuk saling memiliki
2. Semangat untuk membangun
3. Peranserta masyarakat
4. Pembentukan pemahaman / wawasan dan aturan

## 5. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Gambar 2

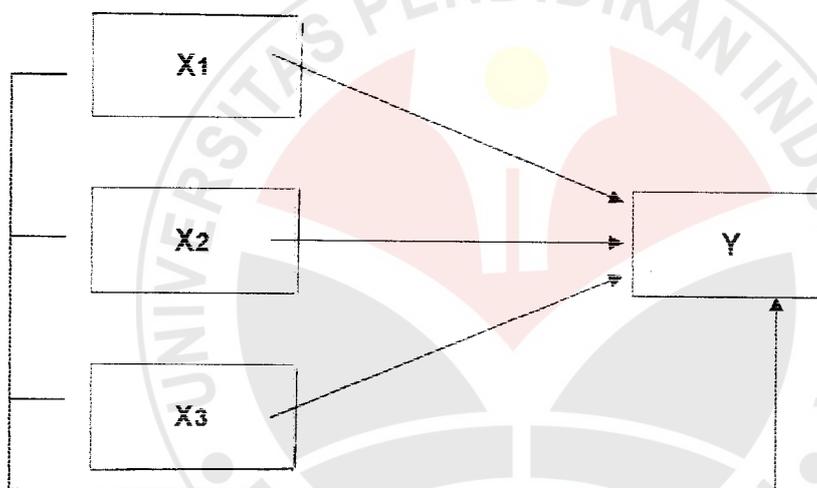
**KERANGKA PENELITIAN**

c. Output

1. Terbentuknya Dewan Sekolah
2. Berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas Dewan Sekolah
3. Tercipta budaya berkualitas
4. Kemandirian sekolah
5. Mutu layanan pembelajaran

Berdasarkan kerangka penelitian di atas , maka disusun kerangka pemikiran statistik yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3



X 1 : langkah-langkah menuju ke arah pemberdayaan dewan sekolah

X 2 : tingkat keterlibatan dewan sekolah

X 3 : Persepsi , peran , fungsi dan pendekatan

Y : Kualitas kinerja manajemen penyelenggaraan pendidikan

## G. Hipotesis

Bertitik tolak dari kerangka berfikir sebagaimana dikemukakan di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- (1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara langkah menuju pemberdayaan dewan sekolah dengan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah ;
- (2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat keterlibatan dewan sekolah dengan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah ;
- (3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara persepsi peran , fungsi dan pendekatan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah ;
- (4) Secara bersama-sama hal di atas terdapat pengaruh positif dan signifikan dengan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

## H. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri atas empat variabel yang dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Dewan Sekolah , adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan , baik pada

jalur pendidikan prasekolah, sekolah, maupun pendidikan luar sekolah. Dewan Sekolah / Komite Sekolah / Majelis Madrasah atau nama lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi , merupakan badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

## 2. Pemberdayaan Dewan Sekolah

Dalam konteks manajemen Aileen Mitchell ( 1998 : 22 ) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah merupakan cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri dan staf kita. Definisi ini bila dikaitkan dengan kajian penelitian ini , dalam arti menggali potensi sumberdaya kemampuan dan potensi yang ada di masyarakat secara praktis dan proaktif untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan berkaitan erat dengan fungsi-fungsi manajer. Selanjutnya Aileen Mitchel Stewart ( 1998 ) mempersyaratkan kecakapan khusus untuk melakukan pemberdayaan masyarakat ( *empowering people* ) , yaitu :

- (1) *Membuat mampu ( enabling ) ;*
- (2) *Memperancar ( facillitating ) ;*
- (3) *Berkonsultasi ( consulting ) ;*
- (4) *Bekerjasama ( collaborating ) ;*
- (5) *Membimbing ( mentoring ) ;*
- (6) *Mendukung ( supporting ) .*

Dewan Sekolah , menurut Departement of Education and Training

mengemukakan apa yang dimaksud dengan Dewan Sekolah adalah kelompok yang mempunyai tanggung jawab untuk menentukan sasaran dan arah yang akan diambil oleh pihak sekolah di waktu mendatang . Dewan ini mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kelompok terlibat dalam pengambilan keputusan penting oleh pihak sekolah. Sedangkan Tim Pokja School Based Management Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ( 2001 : 49 ) mengemukakan bahwa Dewan Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan, yang unsur-unsurnya terdiri dari orang tua siswa, wakil siswa, wakil guru, wakil tokoh masyarakat setempat , wakil masyarakat terinstitusi, kepala sekolah dan utusan pejabat pendidikan. Komite Sekolah / Dewan Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu , pemerataan , , dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan , baik pada pendidikan pra sekolah , jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

3. Keterlibatan Dewan Sekolah , yaitu suatu upaya untuk memperankan dan memfungsikan dewan sekolah dalam menuju ke arah meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan ,

dengan terwujudnya partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah , meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan , partisipasi dalam pelaksanaan , partisipasi dalam memperoleh keuntungan , dan partisipasi dalam mengevaluasi serta partisipasi dalam mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif.

4. Persepsi peran , fungsi dan pendekatan secara menyeluruh , yaitu cara yang digunakan oleh pihak - pihak yang berkepentingan ( stakeholder ) mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah , yang meliputi : (1) masyarakat/orang tua siswa ; (2) pemerintah ; (3) Dunia usaha ; (4) kepala sekolah ; (5) guru

5. Kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan , yaitu suatu kondisi yang diharapkan dalam pelayanan pendidikan di sekolah dengan mengacu pada standar pelayanan minimal , yang meliputi :

- a. Kurikulum
- b. Peserta didik
- c. Ketenagaan
- d. Sarana / prasarana
- e. Organisasi
- f. Pembiayaan
- g. Manajemen sekolah
- h. Peranserta Masyarakat

Adapun indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah

mengacu pada Standar Pelayanan Minimal SD , seperti pada table di bawah ini.

**Tabel 5**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEKOLAH DASAR**

No	Indikator	Ukuran Ketercapaian
1	Kurikulum a. Ketersediaan kurikulum nasional b. Tersebaranya kurikulum lokal a. Keterlaksanaan kurikulum nasional b. Keterlaksanaan kurikulum lokal c. Prosentase daya serap kurikulum nasional d. Prosentase daya serap kurikulum local	Ada Ada 90 % 90 % 75 % 75 %
2	Anak Didik a. Angka Partisipasi Kasar ( APK ) b. Angka Partisipasi Murni ( APM ) c. Angka pendaftara siswa d. Angka putus sekolah e. Angka mengulang kelas f. Survival Rate g. Prosentase kelulusan	75 % Meningkat Meningkat Menurun Menurun Meningkat 90 %
3	Ketenagaan a. Kinerja Kepala Sekolah b. Prosentase guru berkualifikasi c. Prosentasi guru berkeahlian d. Rasio guru dengan siswa	Ada 90 % 50 % 1 : 40
4	Sarana a. Lahan b. Bangunan a. Peralatan/Lab/media b. Buku teks siswa c. Sarana olah raga	Ada Ada Ada Rasio 1 : 1 Ada
5	Organisasi a. Struktur b. Personalia c. Uraian tugas	Ada Ada Ada
6	Pembiayaan a. Anggaran pemerintah b. Anggaran swadaya	Ada Ada
7	Manajemen Sekolah a. Tingkat kehadiran guru b. Tingkat kehadiran tenaga kependidikan lainnya c. Tingkat kehadiran siswa d. Tertib administrasi e. Kinerja sekolah	90 % 90 %   

*dilanjutkan*

8	Peranserta Masyarakat	
	a. Dukungan Badan Peranserta Masyarakat Komite / Dewan Sekolah	Ada
	b. Perhatian orang tua.	Ada
	c. Peranserta tokoh masyarakat	Ada
	d. Peranserta dunia usaha / industri	Ada

## I. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri atas lima bab disusun dengan sistematika sebagai berikut ini.

Bab I . Pendahuluan meliputi ,latar belakang masalah , masalah penelitian , tujuan penelitian , manfaat penelitian , asumsi penelitian , kerangka penelitian , hipotesis , definisi operasional variabel , dan sistematika penulisan.

Bab II. Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan , *bagian pertama* Tinjauan Teoritis , yang meliputi : konsepsi dan peranan administrasi pendidikan konsepsi pemberdayaan , pemberdayaan peranserta dalam komite ; *bagian kedua* : tinjauan empiris ; dan *bagian ketiga* : kesimpulan hasil studi kepustakaan

Bab III. Prosedur penelitian meliputi , metode penelitian , populasi dan sampel , teknik pengumpulan data , instrumen penelitian , dan teknik analisa data.

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan meliputi profil lokasi penelitian , deskripsi dan analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan



